
Dinamika Hubungan Muslim-Kristen di Surakarta, 1999-2000

Adif Fahrizal

Mahasiswa Pascasarjana Sejarah Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Tulisan ini menguraikan bagaimana dinamika hubungan Muslim-Kristen di Surakarta pada era transisi demokrasi setelah berakhirnya Orde Baru. Penelitian untuk tulisan ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa dinamika hubungan Muslim-Kristen di Surakarta pada tahun-tahun awal era Reformasi (1999-2000) diwarnai dengan aksi-aksi solidaritas atas konflik komunal di Maluku dan kasus “penodaan agama” yang berujung di pengadilan. Dalam kedua kasus tersebut peran kelompok-kelompok yang mengusung identitas keagamaan tampak menonjol. Kelompok-kelompok itu lahir setelah runtuhnya Orde Baru yang menekan segala macam ekspresi dan kelompok yang dianggap mengganggu kentrampilan masyarakat dengan mengangkat sentimen-sentimen primordial, termasuk sentimen agama.

Kata kunci: *dinamika, identitas, sentimen primordial.*

Abstract

This article describes the dynamics of Muslim-Christian relations in Surakarta during democratic transition era after New Order demise. This article uses history method consists of heuristic, critics, interpretation, and historiography. Based on the research it is known that the dynamics of Muslim-Christian relations during initial years of Reform era (1999-2000) was shaped by solidarity actions for communal conflict in Maluku and “blasphemy” case that ended in the court. In both cases the role of groups that carried religious identities have prominent role. Such groups emerged after the fall of New Order which repressed all kind of expressions and groups that was considered disrupt harmony by using primordial sentiments, including religious sentiment.

Keywords: *dynamics, identity, primordial sentiment.*

Era transisi dari rezim otoriter ke pemerintahan demokratis kerap diwarnai berbagai gejolak di tengah masyarakat. Potensi-potensi konflik yang sebelumnya

ditekan oleh negara mendadak mencuat ke permukaan. Hal inipun terjadi di Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi

munculnya kelompok-kelompok dan tindakan yang sedikit banyak menggoyahkan harmoni dalam hubungan antar komunitas.

Tulisan ini akan mengangkat bagaimana dinamika hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen di Surakarta pada tahun-tahun awal era Reformasi ketika pecah konflik Muslim-Kristen di sejumlah daerah di Indonesia dan ekspresi serta sentimen keagamaan bisa diekspresikan lebih terbuka di ruang publik. Tulisan ini diawali dengan uraian mengenai persaingan antara komunitas Muslim dan Kristen di Surakarta pada masa Orde Baru dan konteks hubungan Muslim-Kristen di Indonesia yang memburuk pada dasawarsa 1990-an sebagai latar belakang. Selanjutnya akan dipaparkan riak-riak yang terjadi dalam hubungan Muslim-Kristen di Surakarta pada tahun-tahun awal Reformasi yang tidak

bisa dipisahkan dari gejolak konflik antar kedua komunitas di daerah-daerah lain di Indonesia.

Persaingan Muslim-Kristen di Surakarta

Setelah pengganyangan besar-besaran terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia) tahun 1965-1966, kaum abangan yang sering dianggap sebagai simpatisan PKI menjadi obyek dakwah dan pekabaran Injil. Dalam hal ini terjadi persaingan antara kaum Muslim (baca: santri) dengan Kristen dalam “memperebutkan” kaum abangan. Persaingan itu terjadi dalam panggung modernisasi yang diprakarsai pemerintah Orde Baru.

Bagaimana persaingan itu terjadi, perimbangan jumlah pemeluk kedua agama ini pada masa Orde Baru bisa memberikan gambaran.

Perbandingan Jumlah Penduduk Muslim & Kristen (Katolik & Protestan) di Surakarta 1970-1995

Tahun	Muslim	Kristen	Jumlah Penduduk
1970	286.928	78.991	449.128
1975	340.496	86.216	456.032
1980	336.084	112.257	459.257
1985	368.880	123.297	502.156
1990	379.386	129.164	516.967
1995	390.293	135.056	533.317

Sumber: *Sala dalam Angka* tahun 1970 dan *Statistik Tahunan Kotamadya Surakarta* tahun 1975-1995.

Menilik data di atas terlihat bahwa baik pemeluk Islam maupun Kristen sama-sama mengalami peningkatan secara kuantitas. Terjadinya kenaikan ataupun penurunan jumlah pemeluk agama bisa terjadi karena banyak faktor, baik itu angka kelahiran, migrasi, maupun konversi. Sulit untuk menentukan faktor apa-kah yang paling dominan atau sejauh mana faktor-faktor tersebut

berpengaruh pada kenaikan dan penurunan jumlah penduduk Muslim dan Kristen di Surakarta. Mengingat ketiadaan data sulit untuk membuktikan klaim bahwa kenaikan jumlah penduduk Kristen di Surakarta terjadi terutama karena konversi. Di sisi lain perlu pula dicatat bahwa penduduk Muslim-setidaknya yang secara formal menyatakan dirinya beragama Islam- masih merupakan

mayoritas di Surakarta dan jumlahnya secara umum juga terus bertambah.

Bertambahnya jumlah pemeluk agama membawa konsekuensi logis bertambahnya jumlah rumah ibadah guna memenuhi kebutuhan para pemeluk agama untuk beribadah. Bagaimana pertumbuhan rumah ibadah Islam dan Kristen terlihat sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Masjid dan Gereja di Surakarta 1969-1997

Tahun	Masjid	Gereja
1969	71	29
1970	69	34
1974	95	53
1975	97	56
1976	99	61
1977	100	64
1978	100	69
1979	129	71
1980	149	76
1981	171	77
1982	152	84
1983	152	83
1984	176	97
1985	188	99
1986	205	104
1987	216	106
1988	217	105
1989	234	117
1990	241	117
1991	252	120
1992	253	120
1993	259	120
1994	263	121
1995	336	145

Tahun	Masjid	Gereja
1996	337	141
1997	353	141

Sumber: *Sala dalam Angka* tahun 1969-1970 dan *Statistik Tahunan Kotamadya Surakarta* 1975-1995; dan *Kotamadya Surakarta dalam Angka* tahun 1996-1997. Untuk tahun 1971-1973 data tidak tersedia.

Berdasarkan tabel di atas kita bisa melihat terjadinya pertumbuhan masjid maupun gereja yang “fantastis” di Surakarta selama periode Orde Baru. Untuk pertumbuhan jumlah masjid terjadi kenaikan sebanyak hampir lima kali lipat dalam kurun waktu kurang dari tiga dekade -ini belum termasuk jumlah langgar/mushola yang juga terus bertambah pada periode yang sama. Kenaikan sebanyak hampir lima kali lipat atau 500% juga terjadi pada pertumbuhan jumlah gereja di Surakarta dalam kurun waktu yang sama. Pertumbuhan masjid dan gereja yang sangat pesat di Surakarta pada masa Orde Baru ini akan menjadi semakin “fantastis” jika dibandingkan dengan jumlah masjid dan gereja pada masa sebelum Orde Baru. Menurut data Kantor Urusan Agama Kota Besar Surakarta tahun 1951 tercatat jumlah masjid di kota ini sebanyak 58 buah sedangkan gereja hanya berjumlah 13 buah, terdiri dari 11 gereja Protestan dan 2 gereja Katolik (Soetono, 1953: 98). Empat dekade kemudian (1991) tercatat jumlah masjid sebanyak 252 buah atau naik sebesar lebih dari 400%. Kenaikan jumlah gereja lebih luar biasa lagi, dari hanya 13 buah pada 1951 menjadi 120 pada 1991. Dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar lebih dari 900% dalam kurun waktu empat dasawarsa. Meskipun ukuran kualitas keberagamaan masyarakat, data-data kuantitatif di atas bisa menjadi indikasi bahwa proses “pengagamaan” berlangsung dengan sangat intensif di Surakarta. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, keberadaan masjid ataupun gereja dapat dilihat baik

sebagai bagian dari proses “pengagamaan” ataupun hasil dari proses “pengagamaan”.

Berlangsungnya gelombang konversi massal ke Kristen pasca-1965 mencemaskan kalangan Islam, apalagi banyak di antara para konvert itu adalah eks-anggota maupun simpatisan PKI yang notabene adalah musuh politik golongan Islam. Ada kekhawatiran bahwa orang-orang eks-PKI berlindung di gereja untuk meneruskan agendanya menghantam Islam politik mengingat ada kepentingan yang sama dengan kalangan Kristen untuk melawan Islam politik (*Adil*, November 1974). Selain itu, ada pula kekhawatiran jika gelombang konversi ini tidak segera ditanggapi secara serius bukan tidak mungkin dalam jangka waktu beberapa dekade berikutnya umat Islam akan menjadi minoritas. Oleh karena itu, pekabaran Injil yang dilakukan pihak Kristen mendapat perhatian tersendiri dari kalangan Islam di Surakarta. Muncul seruan agar umat Islam memikirkan dan menjalankan langkah-langkah yang efektif untuk menghambat laju Kristenisasi (*Adil*, Januari 1975).

Secara umum terlihat bahwa ada perasaan terancam dari kalangan atas perkembangan Kristen yang pesat di Surakarta pasca-1965. Perasaan terancam ini tentu saja potensial untuk meletup sebagai konflik terbuka bernuansa agama, akan tetapi nyatanya konflik tersebut tidak terjadi di Surakarta. Sekalipun demikian di belahan lain Indonesia ketegangan dalam hubungan Muslim-Kristen meledak menjadi sejumlah insiden kekerasan.

Hubungan Muslim-Kristen di Indonesia pada Era Transisi Demokrasi

Memasuki dekade 1990-an sampai awal 2000-an yang bertepatan dengan akhir Orde Baru dan awal Reformasi hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen di Indone-

sia diliputi suasana tegang. Ketegangan ini bertepatan waktunya dengan dinamika yang terjadi di level elit politik nasional. Dinamika itu diawali dengan pergeseran konstelasi politik ketika rezim Orde Baru merapat kepada kalangan Islam untuk memperoleh legitimasi dan dukungan. Pergeseran ini mengalienasikan sejumlah elit dalam pemerintahan yang kebetulan beragama Kristen. Di kalangan Kristen sendiri mulai timbul kekhawatiran bahwa pergeseran ini adalah tanda-tanda berlakunya Piagam Jakarta secara *de facto* yang akan menjadikan umat Kristiani dan umat non-Muslim lainnya sebagai warga negara kelas dua. Sebaliknya di kalangan Muslim kekhawatiran akan Kristenisasi terus hidup. Pertambahan jumlah pemeluk Kristen dan bertambahnya bangunan gereja di daerah mayoritas Muslim dijadikan indikasi berlangsungnya Kristenisasi yang menjadikan masyarakat Muslim sebagai obyeknya. Kekhawatiran ini memupuk kecurigaan dan perasaan terancam di antara kedua komunitas yang menimbulkan sejumlah letupan.

Periode 1995-1998 diwarnai dengan kerusuhan bernuansa agama di banyak tempat di Indonesia. Pada awal 1995 pecah kerusuhan berupa pembakaran pasar di Baucau Timor Timur – saat itu masih bagian dari Indonesia – yang menyasar warga pendatang. Selanjutnya pada 11 Juni 1995, dipicu oleh kasus pelecehan agama, warga di kota Larantuka Nusa Tenggara Timur yang beragama Katolik menyerang rumah dan toko milik warga pendatang yang non-Katolik. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 8-10 September 1995 pecah kerusuhan di Dili Timor Timur yang kembali menjadikan warga pendatang sebagai sasaran, kali ini juga dipicu isu pelecehan agama oleh seorang sipir penjara yang Muslim dan pendatang. Dalam kerusuhan ini 200 kios di Pasar Komoro milik pendatang dibakar. Masjid dan panti asuhan juga dirusak. Akibat kerusuhan ini

banyak pendatang yang mengungsi dari Timor Timur (Zon, 2004: 14-5).

Seolah pembalasan atas kerusakan di Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, tanggal 9 Juni 1996, 10 gereja di Surabaya Jawa Timur dirusak massa. Menyusul kemudian tanggal 10 Oktober 1996 masih di Jawa Timur tepatnya di Situbondo pecah kerusakan yang mengakibatkan 21 gedung gereja, sekolah Kristen, dan panti asuhan Kristen hangus dibakar massa serta 9 gedung milik umat Kristen rusak atau hancur. Dari Jawa Timur kerusakan menjalar ke Jawa Barat. Hanya sehari setelah Natal tahun 1996 kerusakan meletus di Tasikmalaya, akibatnya 15 gedung gereja rusak atau dibakar. Memasuki tahun 1997 kerusakan pecah di Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, dalam kerusakan ini 5 gereja hangus terbakar. Pada masa kampanye Pemilu 1997 kerusakan terjadi di sejumlah daerah. Meskipun dilatarbelakangi sentimen anti-partai penguasa (Golkar) namun gereja dan gedung-gedung milik umat Kristen lainnya juga menjadi sasaran amuk massa. Di Banjarmasin Kalimantan Selatan misalnya, tercatat 10 gereja ditambah sejumlah bangunan lainnya dibakar massa (Aritonang, 2006: 463-78).

Pelbagai kerusakan tersebut menjadi awal instabilitas sosial-politik yang berujung pada kejatuhan rezim Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru sendiri diiringi dengan kerusakan di beberapa daerah – termasuk di Surakarta – pada bulan Mei 1998.¹ Runtuhnya Orde Baru tidak mengakhiri ketegangan Muslim-Kristen yang terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya, malah kekerasan bernuansa sentimen agama semakin menjadi-jadi. Pada 22 November

Desember 1998 kerusakan pecah di Jalan Ketapang Jakarta. Berawal dari perselisihan antara warga setempat (Muslim) dengan sekelompok preman dari etnis Batak dan Ambon (Kristen) yang menjaga rumah judi berkedok permainan ketangkasan terjadi kerusakan anti-Kristen. Dalam kerusakan ini 22 gedung gereja dan 3 gedung sekolah dirusak dan dibakar. Penyerangan kaum Muslim terhadap umat Kristen yang berlangsung sejak 1996 rupanya memancing reaksi kekerasan serupa dari umat Kristen. Tidak lama berselang setelah kerusakan Ketapang Jakarta, pada 30 November-2 Desember 1998 terjadi kerusakan anti-Muslim di Kupang Nusa Tenggara Timur. Terjadi perusakan dan pembakaran atas masjid, sekolah, asrama haji, toko dan rumah-rumah pendatang Muslim yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Kupang sempat diduduki oleh massa. Kerusakan yang berlangsung selama tiga hari ini meluas pula ke beberapa daerah di luar kota Kupang (Aritonang, 2006: 533-7). Pertikaian Muslim-Kristen juga menjalar ke Sulawesi. Menjelang akhir tahun 1998 pertikaian pecah di Poso Sulawesi Tengah. Kali ini sebagai buntut dari persaingan elit politik di tingkat lokal terkait jabatan bupati. Bupati Poso yang Muslim dan Sekwilda (Sekretaris Wilayah Daerah) Tingkat II Poso yang Kristen sama-sama mengeksploitasi sentimen agama dalam perebutan jabatan bupati yang kemudian memicu bentrokan antara kelompok Muslim dengan Kristen di Poso (Aragon, 2001: 45-79 dan Klinken, 2007: 72-87).

Ketegangan dalam hubungan Muslim-Kristen di Indonesia semakin memuncak menyusul pecahnya konflik komunal antara

¹ Kerusakan yang terjadi pada bulan Mei 1998 tidak menasar umat Kristen secara khusus tetapi dalam kerusakan ini warga etnis Cina yang banyak di antaranya beragama Kristen menjadi sasaran utama amuk massa. Tentang jumlah korban dan kerugian akibat Kerusakan Mei di Jakarta lihat Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dalam Zon, 2004: 105-6.

kedua komunitas di Ambon, Maluku, pada awal 1999. Di kalangan Muslim beredar kabar bahwa terjadi pembantaian terhadap kaum Muslim di Ambon. Kabar ini memicu kemarahan kaum Muslim dan di berbagai daerah muncul seruan berjihad ke Ambon (Eriyanto, 2003). Di Maluku sendiri konflik Muslim-Kristen menjalar ke luar Ambon. Pada akhir 1999 konflik sudah meluas sampai ke Pulau Halmahera di Kabupaten Maluku Utara. Sebagaimana dalam kasus Ambon, beredar pula kabar di kalangan Muslim bahwa terjadi pembantaian terhadap kaum Muslim di beberapa kecamatan di Pulau Halmahera bagian utara (Klinken, 2007: 88-106 dan 107-25).

Memasuki tahun 2000 tidak ada tanda-tanda konflik komunal di Maluku mereda. Bahkan konflik serupa meletus pula di Poso pada bulan April-awal Mei 2000, yang kembali dilatarbelakangi persaingan elit lokal. Kerusuhan pecah di Poso melibatkan bentrokan antara massa Muslim dan Kristen. Pada akhir Mei pihak Kristen melakukan balasan dengan menyerang warga Muslim yang tinggal di pedalaman. Konflik komunal terus berlanjut hingga tahun berikutnya (Klinken, 2007: 86).

Ketidakmampuan pemerintah mengatasi konflik komunal memicu timbulnya kehendak masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri. Menanggapi makin meluasnya konflik yang memakan banyak korban dari kaum Muslim di Maluku, pada pertengahan tahun 2000 organisasi yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama'ah (FKAWJ) di bawah kepemimpinan Ja'far Umar Thalib membentuk Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jama'ah – selanjutnya dikenal sebagai Laskar Jihad – untuk berjihad membela

kaum Muslimin yang kabarnya dibantai di Maluku. Laskar Jihad mengumpulkan sumbangan dan merekrut sukarelawan untuk dikirim ke Maluku serta mengadakan pelatihan semi-militer bagi para sukarelawan tersebut. Laskar Jihad berhasil mengadakan pelatihan semi-militer dan mengirimkan sukarelawannya ke Maluku tanpa hambatan dari aparat keamanan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Laskar Jihad mendapat beking dari sekelompok orang di jajaran militer dan sejumlah elit politik.²

Berbagai konflik Muslim-Kristen yang merebak di Indonesia pada dekade 1990-an-2000 ikut dirasakan pula dampaknya di Surakarta. Konflik tersebut menjadi momentum bagi artikulasi sentimen agama di ruang publik. Terlebih konflik itu terjadi setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Ruang publik menjadi terbuka lebar bagi artikulasi identitas dan sentimen agama di ruang publik. Hal inilah yang muncul di Surakarta pada sekitar tahun 1999-2000.

Riak-Riak Hubungan Muslim-Kristen di Surakarta, 1999-2000

Tumbangnya rezim Orde Baru membuka keran kebebasan yang sebelumnya disumbat oleh rezim. Sebagai dampaknya, penonjolan identitas primordial yang pada masa Orde Baru ditabukan di bawah label SARA mendapat ruang untuk diekspresikan secara terbuka. Berakhirnya Orde Baru juga disertai dengan melemahnya otoritas negara yang membuat banyak konflik laten yang sebelumnya ditekan mencuat ke permukaan. Inilah yang terjadi dalam kasus konflik komunal yang melibatkan umat Islam dan Kristen di Maluku dan Poso. Gema konflik di kawasan timur Indonesia ini terdengar pula sampai ke Surakarta dan mendorong timbul-

² Spekulasi ini muncul dalam konteks pertarungan elit politik ketika itu yang notabene sejumlah elit militer tidak menyukai kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap banyak memangkas peranan militer (O' Rourke dalam van Klinken, 2007: 103).

nya aksi-aksi solidaritas membela saudara seagama. Untuk meredam situasi yang mulai panas sejumlah pihak berusaha mengangkat wacana yang bisa memperdamaikan komunitas Muslim dan Kristen. Akan tetapi ada kalanya usaha ini justru menjadi bumerang bagi penganjurnya sendiri sebagaimana terjadi dalam kasus Ahmad Welson.

1. Gema Konflik Maluku

Tragedi kerusuhan di Ambon turut dirasakan gaungnya di Solo. Kerusuhan yang mulai meletus pada awal tahun 1999 ini menjadi momentum kemunculan elemen-elemen Islam 'bawah tanah' menampilkan eksistensi dan menyuarakan aspirasinya secara terbuka. Menanggapi pecahnya kerusuhan di Ambon pada akhir Januari 1999 DPD PK (Partai Keadilan) Solo mengajak warga Solo dan sekitarnya membantu kaum Muslimin di Ambon yang menjadi korban kerusuhan. PK menyebarkan surat kepada takmir-takmir masjid di Solo berisi ajakan membantu kaum Muslimin di Ambon (*Solopos*, 30 Januari 1999). Selanjutnya pada 5 Februari 1999 KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) daerah Solo mengadakan aksi Peduli Ambon dengan memasang poster dan membagikan selebaran berisi data-data tentang apa yang terjadi di Ambon. Mereka juga mengumpulkan infak untuk disalurkan kepada korban kerusuhan (*Solopos*, 6 Februari 1999). Berikutnya pada hari Kamis 11 Maret FPIS (Front Pemuda Islam Surakarta) yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi Islam di Solo mendatangi balai kota untuk meminta berdialog dengan Walikota Solo Imam Soetopo. Peserta aksi menyuarakan tuntutan yang diberi judul "Ultimatum Surakarta" berisi desakan agar Panglima ABRI dan Kapolri mundur dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan masalah Ambon. Dalam aksi ini massa FPIS sempat mencegat Gubernur Jawa Tengah

Mardiyanto yang sedang berkunjung ke Solo untuk menyampaikan aspirasinya. Gubernur lalu menyumbang uang sebesar Rp 251.500 untuk korban kerusuhan (*Solopos*, 12 Maret 1999). Keesokan harinya, Jum'at 12 Maret 3.000 umat Islam yang tergabung dalam FPIS mengadakan aksi peduli Ambon di Masjid Kottabarat Jl. Moewardi Solo. Aksi ini diisi orasi sejumlah tokoh Islam Solo seperti Mudrick Sangidoe, Zaenal Ma'arif (PPP), Fajri Muhammad (PK), dan beberapa ulama Solo. Selain orasi dalam aksi ini juga dilakukan penggalangan dana yang berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 3,7 juta untuk disumbangkan kepada kaum Muslim Ambon. Tidak hanya orasi dan penggalangan dana, ada pula pengumuman bahwa 300 orang telah mendaftar untuk siap dikirim berjihad ke Ambon (*Solopos*, 13 Maret 1999). Kelompok-kelompok Islam yang aktif menyerukan solidaritas untuk Ambon ini adalah kelompok-kelompok yang belum muncul pada masa Orde Baru. Mereka muncul bersama dengan datangnya era Reformasi.

Ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen rupanya merambat juga sampai ke Surakarta dan sekitarnya. Pada awal April 1999 beredar isu di kalangan umat Islam Surakarta bahwa pihak Kristen akan meng-"Ambon"-kan Solo. Isu ini menyebutkan bahwa pihak Kristen telah mengadakan rapat gelap di SMKK (Sekolah Menengah Kejuruan Kristen) Kecamatan Simo Boyolali (15 km sebelah barat Surakarta) yang hasilnya menyepakati untuk membuat kerusuhan di Solo, Yogyakarta, dan Madiun. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pihak Kristen telah menyiapkan rencana tersebut dengan matang. Konon perlengkapan senjata mulai dari senjata tajam sampai senjata api sudah disiapkan dalam jumlah banyak. Untuk pembiayaan rencana ini disebut-sebut pihak Kristen mengklaim mendapat bantuan dari Amerika dan Israel. Isu ini

seolah dikuatkan dengan kabar terjadinya penyerangan terhadap Pondok Pesantren Darusy Syahadah, milik kelompok JI, yang juga terletak di Kecamatan Simo pada 8 April (Solahudin, 2011: 241). Dalam penyerangan itu disebut-sebut terjadi pemotongan kabel listrik dan seorang tak dikenal ditangkap namun kemudian berpura-pura gila (*Media Dakwah*, 1999).

Beredarnya isu rencana kerusakan jelas berpotensi memicu konflik antara komunitas Muslim dan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Untuk mencegah timbulnya gejala, sejumlah elemen umat Islam di Surakarta dan sekitarnya menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu rencana kerusakan tersebut. Salah seorang pengurus FKUIS (Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta) yang juga Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Surakarta Moechson Boerhani mengaku telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar. Hal serupa dinyatakan DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Surakarta dalam pernyataan resminya. DPC PPP Surakarta menyatakan bahwa isu itu sengaja dibuat untuk memancing kemarahan umat Islam dan menghimbau umat Islam agar tidak terpancing untuk melakukan perlawanan dengan tindakan anarkis karena itu hanya akan memojokkan umat Islam sendiri dan menguntungkan kelompok *status quo* Orde Baru (*Solopos*, 12 April 1999: 6). DPD PAN Boyolali lewat sekretarisnya Thonthowi Jauhari ikut membantah kabar adanya rapat gelap di SMK Kristen Simo Boyolali. Thonthowi yang juga warga Simo mengaku pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki isu itu dan berdasarkan investigasinya kepada warga sekitar sekolah dan pihak sekolah menyatakan bahwa rapat gelap yang disebut-sebut dalam isu itu tidak pernah ada. Ia pun menuturkan bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak

diinginkan para tokoh agama di Kecamatan Simo telah mengadakan pertemuan dan kesepakatan bersama di kantor kecamatan. Mereka sepakat tidak akan membuat kerusakan dan tidak terpancing selebaran gelap bernuansa SARA yang beredar ketika itu (*Solopos*, 14 April 1999). Pernyataan membantah isu dan menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi pun datang dari pihak FKUB (Forum Komunikasi Umat Beriman) yang mewadahi tokoh-tokoh lintas agama di Surakarta (*Solopos*, 15 April 1999). Dari pihak Kristen, dalam rapat kerja PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) se-eks Keresidenan Surakarta di Colomadu Karanganyar Ketua DPD I PDKB Jawa Tengah Susilo mengharapkan semua pihak agar tetap waspada dan berdoa menanggapi isu-isu kerusakan khususnya yang beredar di kota Solo (*Solopos*, 26 April 1999).

Akan tetapi sebagian elemen umat Islam tetap bersikeras bahwa kabar rapat gelap di Simo itu adalah benar adanya. Dalam pernyataan yang dimuat di harian *Solopos*, FPIS dan kelompok yang menamakan dirinya Kontrasi (Komite Orang Hilang dan Tindak Kekerasan terhadap Umat Islam) mengaku telah mengadakan investigasi ke lokasi dan mengklaim bahwa informasi adanya rapat gelap itu memang benar-benar terjadi. Juru bicara FPIS mengaku bahwa mereka menyampaikan hal tersebut bukan untuk memanas-manasi melainkan agar masyarakat waspada. Adapun tentang selebaran yang mereka sebar tanpa mencantumkan nama asli narasumbernya menurut FPIS dan Kontrasi adalah karena menurut mereka sumber yang mengetahui peristiwa kekerasan tidak pernah mendapat perlindungan hukum (*Solopos*, 15 April 1999).

Terkait isu rapat gelap, pihak aparat keamanan yang diwakili Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol (Art) I Made

Sarwa menyatakan isu rapat gelap itu hanyalah isu yang dibuat oleh “orang-orang tak bertanggung jawab yang ingin menggagalkan Pemilu”.³ Pihaknya mengaku telah melakukan serangkaian penyelidikan ke sekolah yang bersangkutan dan hasilnya menurut Dandim tidak ada rapat gelap yang disebut-sebut dalam isu itu. Mengenai kabar terjadinya penyerangan terhadap pesantren Darusy Syhadah, Dandim juga membantahnya namun ia membenarkan adanya pencurian kabel listrik oleh tiga orang tak dikenal dan tertangkapnya seorang yang ternyata gila. Tentang penangkapan tersebut Dandim membantah bahwa orang yang semula diduga provokator itu berpura-pura gila melainkan memang benar-benar gila (*Solopos*, 16 April 1999). Secara tidak langsung sebenarnya pernyataan Dandim ini mengonfirmasi kabar terjadinya “penyerangan” yang diklaim pihak pesantren. Namun di sisi lain tampaknya Dandim ingin menyatakan bahwa pemotongan kabel listrik di lokasi pesantren itu hanya kasus kriminal biasa (*Solopos*, 22 April 1999). Sementara itu pihak pesantren mengaku ditekan oleh beberapa oknum aparat keamanan untuk membuat kesaksian bahwa serentetan peristiwa yang terjadi adalah bohong dan ulah provokator belaka. Artinya bukan benar-benar dimaksudkan sebagai serangan melainkan sekadar memancing reaksi dari pihak pesantren. Tekanan ini ditolak oleh pihak pesantren yang bersikeras bahwa semua peristiwa itu memang terjadi dan dimaksudkan sebagai serangan terhadap mereka (*Media Dakwah*, 1999).

Bukan hanya aparat keamanan yang melakukan penyelidikan, salah satu lembaga swadaya masyarakat KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Boyolali juga mengaku telah melakukan investigasi atas isu rapat gelap dan mengambil kesimpulan yang sama dengan pihak Kodim. Adapun menanggapi bantahan ulang dari KontraS, KIPP mempertanyakan mengapa KontraS tidak melaporkannya kepada aparat keamanan. Bahkan KIPP berspekulasi bahwa KontraS-lah yang membuat isu rapat gelap dan selebaran gelap yang berisi isu tersebut (*Solopos*, 16 April 1999). Belakangan pihak KontraS bersama FPIS mengakui bahwa merekalah yang menyebarkan selebaran tersebut hanya saja mereka tetap mengklaim bahwa isu yang diangkat dalam selebaran itu adalah nyata. Namun pernyataan KIPP ini memancing pihak KontraS untuk menuntut KIPP meminta maaf atau membawa kasus pernyataan ini ke pengadilan (*Solopos*, 19 April 1999). KIPP akhirnya meminta maaf kepada KontraS seraya meralat pernyataannya. KIPP kemudian menuding “Kelompok Naga Hijau” berada di belakang penyebaran isu rapat gelap dan rencana kerusuhan itu.⁴ Penyelidikan dari KIPP ini menunjukkan bahwa berakhirnya Orde Baru membuka ruang bagi elemen-elemen masyarakat sipil untuk memasuki ranah yang sebelumnya menjadi hak eksklusif negara.

Isu rencana kerusuhan oleh pihak Kristen itu sendiri direspon lebih jauh oleh FPIS dengan mengadakan tabligh akbar di Stadion Manahan Surakarta tanggal 16 April 1999. Tabligh akbar tersebut diisi

³ Pernyataan semacam ini adalah pernyataan standar yang biasa dikeluarkan para pejabat – khususnya pejabat keamanan – pada masa Orde Baru. Keluarnya pernyataan semacam ini dari seorang Dandim pada masa awal Reformasi menunjukkan masih begitu kuatnya bahasa-bahasa yang diwarisi dari wacana Orde Baru. Tentang penggunaan bahasa dalam wacana rezim Orde Baru, lihat Dhakidae, 2003: 362-443.

⁴ *Solopos*, 20 April 1999. Naga Hijau sendiri adalah nama sebuah operasi intelijen yang kerap disebut-sebut pada tahun-tahun akhir Orde Baru setiap kali ada kekacauan atau aksi-aksi kekerasan sistematis. Lihat “Naga Hijau: antara Ada dan Tiada” (*Majalah D & R* no. 23 edisi 25 Januari 1997: 14).

dengan orasi pembicara dari DDII dan KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam).⁵ Dalam tabligh akbar itu pihak FPIS menyerukan agar umat Islam di Sukarta tidak terprovokasi. Namun pada saat yang sama FPIS “menyerukan kepada segenap eksponen pejuang Islam untuk bahu membahu menghilangkan penderitaan dan penindasan terhadap umat Islam” dan menuding adanya perusahaan di Karanganyar yang memesan pedang sejumlah 1500 buah. FPIS lalu meminta aparat keamanan agar segera bertindak mengusut “kasus” tersebut sampai tuntas seraya menyatakan bahwa jika aparat terlambat dalam bertindak maka mereka akan “melakukan (tindakan, pen.) sesuai dengan syariat kami” (*Solopos*, 18 April 1999). Dalam kesempatan tabligh akbar lainnya menyambut Tahun Baru Islam 1420 H di Stadion Sriwedari Ketua DPP PBB (Partai Bulan Bintang) K.H. Abdul Qodir Djaelani menyatakan bahwa “berbagai teror dan penindasan yang dialami umat Islam tidak berjalan secara sporadis dan telah direkayasa”. Ia memperingatkan jangan salahkan umat Islam jika nantinya melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan teror terhadap umat Islam. Tanpa menyebut nama ia pun menyatakan bahwa saat ini ada “sejumlah kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan arogansinya menyatakan permusuhan kepada umat Islam” (*Solopos*, 28 April 1999). Pihak Pondok Pesantren Darusy Syahadah juga mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan dengan membuat benteng

pertahanan dan menyiapkan senjata-senjata tajam. Satu hal yang menarik, seorang purnawirawan Kopassus TNI AD berpangkat Mayor ikut memberi petunjuk teknis kepada para santri Darusy Syahadah untuk membangun pertahanan menghadapi ancaman penyerangan. Penyerangan yang disebut-sebut dialami Darusy Syahadah sendiri kabarnya juga dilakukan dengan cara-cara militer yang profesional.⁶

Secara garis besar terlihat bahwa respon elemen-elemen Islam di Surakarta atas isu rencana kerusuhan oleh pihak Kristen terbelah dua. Di satu pihak ada elemen-elemen yang menolak untuk mempercayai isu tersebut sedangkan di pihak lain ada elemen-elemen yang bukan hanya mempercayai isu itu tetapi juga menyerukan agar umat Islam “bersiap siaga” menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Terlihat jelas adanya perasaan dari sebagian elemen umat Islam tersebut bahwa umat Islam sedang berada dalam ancaman. Jika melihat komposisi penduduk Surakarta dan sekitarnya yang mayoritasnya adalah Muslim isu akan adanya aksi kerusuhan oleh pihak Kristen dengan sasaran kaum Muslim tampak tidak masuk akal. Akan tetapi pecahnya konflik di Maluku yang disertai pemberitaan masif oleh sejumlah media Islam tentang banyaknya korban jatuh dari pihak Muslim sepertinya memengaruhi suasana kebatinan sebagian kelompok Islam itu (Brauchler, 2003: 123-51).

Di sisi lain respon dari kalangan masyarakat pada umumnya maupun pihak

⁵ *Media Dakwah*, no. 299 Muharram 1420/Mei 1999, hlm. 10-11. KISDI adalah organisasi yang dibentuk atas prakarsa para tokoh DDII untuk menggalang solidaritas atas nasib umat Islam yang menjadi korban konflik dan penindasan di berbagai penjuru dunia. Pada daswarsa 1990-an KISDI sering mengadakan aksi kepedulian atas nasib umat Islam di Bosnia, Palestina, dan sebagainya. lihat van Bruinessen, 2013: xv & 41-2.

⁶ *Media Dakwah*, no. 299 Muharram 1420/Mei 1999: 10-11. Keterlibatan oknum-oknum militer atau orang-orang terlatih yang diduga kuat sebagai anggota militer jamak dijumpai dalam pelbagai aksi kekerasan yang menyertai Reformasi 1998 baik sebelum maupun setelah lengsernya Soeharto. Lihat misalnya *Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Kerusuhan Mei 1998* dan *Temuan TPF (Tim Pencari Fakta Independen) DPW Partai Keadilan Jawa Timur atas Kasus Banyuwangi*.

birokrat menafikan potensi riil terjadinya konflik di masyarakat dengan selalu mengarahkan telunjuk kepada “pihak ketiga”, “provokator”, atau “orang-orang tak bertanggung jawab” yang hendak mengadu domba masyarakat dan “memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa” demi kepentingannya sendiri. Tampak adanya asumsi bahwa pihak yang menghendaki terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat selalu merupakan orang-orang atau kelompok yang berada di luar dua kelompok masyarakat yang hendak dibenturkan itu. Asumsi ini sekaligus menyiratkan asumsi lainnya bahwa masyarakat Surakarta, atau lebih luasnya lagi masyarakat Indonesia, adalah masyarakat yang harmonis dan cinta damai serta (seolah-olah) tidak memiliki masalah dalam hubungan antar komunitas yang berbeda, baik etnis maupun agama. Di tengah konteks masyarakat yang demikian sikap sebagian kelompok Islam yang menunjuk pihak Kristen sebagai pembuat gara-gara – meskipun terkadang di sana-sini masih diselimuti ungkapan-ungkapan bersayap – adalah sikap yang berani keluar dari *mainstream* dan boleh jadi mengejutkan. Akan tetapi era Reformasi telah membuka kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya dengan bebas sekalipun sikap menjaga harmoni masyarakat di permukaan masih tetap kuat.

Di pihak lain ada pula beberapa orang yang ingin keluar dari narasi harmoni semu warisan Orde Baru sekaligus tidak ingin terjebak dalam pusaran konflik horizontal. Di tengah merebaknya sejumlah konflik horizontal, pemimpin Pondok Pesantren Al Muayyad Windan Makamhaji Kartasura sekaligus Ketua PCNU Surakarta Muhammad Dian Nafi menyatakan bahwa politik representasi harus didobrak. Yang dimaksud politik representasi adalah sebuah strategi politik yang menekankan pada

perwakilan dan penguasaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Menurut Dian dalam politik representasi setiap kelompok akan saling mengalahkan dan bahkan saling meniadakan. Ia mencontohkan jika parpol A menang dalam Pemilu maka semua jabatan atau kekuasaan dikuasai parpol itu tanpa memberikan kesempatan kepada parpol lain. Ia merasa prihatin bahwa politik representasi ini dilakukan oleh semua kalangan termasuk organisasi berbasis agama. Jika ini yang terjadi maka akan ada persaingan di antara umat beragama untuk menguasai umat beragama lainnya dan ini dapat menimbulkan konflik antar pemeluk agama (*Solopos*, 27 April 1999). Pernyataan salah seorang tokoh Islam Surakarta ini menjadi menarik karena ia secara terbuka mengkritik politik representasi yang pada akhir Orde Baru kerap didengung-dengungkan sebagian kalangan Islam (Schwarz, 1997: 179-80). Dalam kesempatan lain, menanggapi isu rapat gelap yang beredar di Boyolali Lembaga Bantuan Kemanusiaan Umat Beragama (LBK) Boyolali menyatakan bahwa isu tersebut muncul karena agama telah dipolitisir oleh partai politik tertentu. Secara spesifik LBK juga menyinggung beredarnya isu Islamisasi maupun Kristenisasi. Kedua isu itu menurut LBK sengaja ditebarkan oleh “kelompok tidak bertanggung jawab” yang ingin memecah belah bangsa dengan area penyebaran isu yang berbeda. Isu Kristenisasi disebar di Pulau Jawa sementara isu Islamisasi disebar di Indonesia Timur (*Solopos*, 28 April 1999). Meskipun masih menggunakan gaya narasi warisan Orde Baru dengan menunjuk “kelompok tidak bertanggung jawab” namun dalam mengarahkan pernyataannya LBK relatif lebih spesifik dengan menyebut-nyebut soal keterlibatan partai politik. Dalam hal ini LBK keluar dari gaya narasi ala Orde Baru yang dalam menunjuk “pihak ketiga” selalu mengarahkannya kepada pihak-pihak di luar

sistem kekuasaan semisal “ekstrim kanan”, ekstrim kiri”, dan sebagainya, tak peduli apakah tuduhan itu berdasar atau tidak. Berbeda dengan para pejabat, LBK tidak mengarahkan tuduhannya kepada pihak-pihak di luar sistem kekuasaan melainkan pihak yang berada di dalam sistem kekuasaan sendiri yaitu partai politik.

Konflik komunal yang tak kunjung mereda di Maluku menimbulkan kekhawatiran merembetnya konflik ini ke daerah-daerah lain di Indonesia. Di Solo kekhawatiran ini sempat merebak seiring dengan digelarnya Apel Akbar Umat Islam pada 19 Januari, tepat setahun setelah pecahnya kerusuhan di Ambon. Beredar desas-desus bahwa aksi solidaritas atas nasib umat Islam di Maluku ini akan berbuntut kerusuhan berupa penyerangan terhadap gereja-gereja di Solo. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan aparat keamanan dari TNI dan Polri berjaga-jaga di sejumlah gereja yang ada di kota Solo. Akan tetapi desas-desus ini tidak terbukti. Dalam apel akbar itu sendiri dua orang pembicara K.H. Awaludin dan K.H. Abdul Qodir Djaelani menyerukan persatuan umat Islam dan menekankan pentingnya semangat jihad. Apel akbar ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 4 juta untuk kaum Muslim Ambon (*Solopos*, 20 Januari 2000).

Sekalipun banyak mendapat sambutan hangat, tidak selamanya aksi solidaritas atas Muslim Maluku didukung oleh sesama elemen umat Islam sendiri. Pada 3 Maret 2000 lima orang anggota DPRD Surakarta beragama Islam melayangkan surat kepada Kapolresta Surakarta yang isinya meminta pihak Polresta Surakarta menertibkan aksi pendaftaran sukarelawan dan penggalangan dana untuk Muslim Ambon oleh sebuah organisasi Islam di sejumlah titik strategis kota Surakarta. Mereka melayangkan surat itu setelah menerima banyak pengaduan

dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aksi tersebut. Para anggota dewan itu menilai aksi peduli Ambon itu “cenderung melecehkan eksistensi umat Islam” dan jika terus berlanjut dikhawatirkan “akan menjadi kontraproduktif dan mendiskreditkan keagungan Islam” (*Solopos*, 4 Maret 2000). Menanggapi hal ini Kapolwil Surakarta Kolonel (Pol) Aris Sampoerno Djati menyatakan sebaiknya kegiatan penggalangan dana itu tidak dilakukan di jalan raya melainkan cukup di tempat ibadah saja (*Solopos*, 6 Maret 2000).

Munculnya keberatan atas aksi penggalangan dana ini ditanggapi balik oleh FKAWJ sebagai pihak yang melakukan penggalangan dana tersebut. Pada 6 Maret 2000 para aktivis FKAWJ mendatangi gedung DPRD Surakarta dan berdialog dengan anggota dewan terkait aksi peduli Ambon yang mereka lakukan. FKAWJ mengaku menyalurkan sumbangan yang diperolehnya kepada MUI Maluku. Adapun terkait keberatan atas aksi mereka salah seorang anggota dewan menuturkan pihak FKAWJ bisa mengerti dan akan menghubungi wadah Islam lainnya di Solo (*Solopos*, 7 Maret 2000). Keesokan harinya tanggal 7 Maret 2000 anggota FKAWJ kembali mendatangi gedung DPRD Surakarta untuk menjelaskan aktivitas penggalangan dana itu. Mereka bersedia menolerir jika dikatakan aksinya mengganggu ketertiban umum namun menolak bila dikatakan meresahkan masyarakat. FKAWJ balik mempertanyakan masyarakat yang mana yang terganggu dengan aksi mereka (*Solopos*, 8 Maret 2000).

Terlepas dari pro-kontra soal penggalangan dana yang dilakukan FKAWJ, konflik komunal di Maluku memang mendapat perhatian yang serius dari berbagai elemen umat Islam di Surakarta. Munculnya berbagai aksi peduli Maluku sekaligus memunculkan ke permukaan sejumlah

organisasi Islam baru yang belum ada pada masa Orde Baru -sebut saja misalnya PK, FPIS, atau FKAWJ. Tumbuhnya organisasi-organisasi baru ini adalah buah dari proses Islamisasi yang berlangsung pada era Orde Baru. Tumbuhnya Orde Baru menjadi momentum bagi organisasi-organisasi Islam baru tersebut untuk menunjukkan eksistensinya. Aksi peduli Maluku menjadi ajang bagi mereka untuk menanamkan kesadaran akan identitas Islam berhadapan dengan sang “liyan” yang direpresentasikan oleh pihak Kristen.

2. Penodaan Agama: Kasus Ahmad Welson

Pada hari Kamis 24 Februari 2000 pukul 20.15 WIB Radio PTPN Rasitania Surakarta menyiarkan acara dialog interaktif tentang hubungan Islam-Kristen. Tema dialog ini sengaja diangkat terkait dengan situasi aktual saat itu yang notabene sedang marak konflik Muslim-Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai narasumber diundang seorang yang mengaku sebagai pendeta Kristen bernama Ahmad Welson.⁷ Ia tampil sebagai narasumber tunggal. Dialog yang berlangsung kurang dari satu jam dengan sang “pendeta” yang tidak jelas asal usulnya ini mungkin hanya akan ditelan angin lalu seandainya saja tidak ada yang mengangkatnya sebagai kasus publik. Namun sepekan kemudian nama Ahmad Welson mendadak menjadi buah bibir masyarakat kota Solo setelah Ketua DPC PPP Surakarta Mudrick S.M. Sangidoe, pengacara sekaligus kader PPP Muhammad Taufiq dan Fraksi Pembaharuan DPRD Kota Surakarta melaporkan Welson ke Polresta Surakarta terkait pernyataannya dalam dialog interaktif di Radio PTPN yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Welson

disebut-sebut mengeluarkan pernyataan bahwa “Nabi Muhammad sebelum masuk (memeluk) Islam adalah pemeluk Kristen”. Menanggapi kasus ini pihak Radio PTPN mengaku dialog interaktif itu terselenggara atas permintaan Welson sendiri dan ia bersedia mempertanggungjawabkan apa yang diutarakannya dalam acara *on air* itu. Pihak radio mengaku akan menggelar kembali dialog serupa dengan melibatkan narasumber dari pihak umat Islam sebagai penyeimbang atas dialog interaktif dengan Welson. Adapun Welson sendiri mengaku dirinya sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan Islam. Ia mengaku hanya ingin merukunkan pemeluk kedua agama yang sering berkonflik itu. Welson juga mengaku sudah berbicara dengan Departemen Agama, Polresta Surakarta, dan beberapa tokoh Islam untuk menjelaskan alasan dan latar belakang pernyataannya. Kepada harian Solopos ia menyatakan siap menghadapi tuntutan dari umat Islam selama dilakukan dengan mengedepankan akal sehat dan bukan kekuatan fisik (*Solopos*, 2 Maret 2000). Satu hal yang perlu dicatat, meskipun mengaku sebagai pendeta Welson ternyata tidak bergabung dengan gereja manapun. Ini diakui oleh dirinya sendiri dan dibenarkan oleh Bimas (Bimbingan Masyarakat) Kristen Departemen Agama Jawa Tengah (*Solopos*, 2 dan 4 Maret 2000).

Polisi bergerak cepat menangani kasus dugaan pelecehan agama ini dengan menangkap Welson dan memeriksa sejumlah saksi. Tanggal 2 Maret polisi mendatangi kantor Radio PTPN dan menyita peralatan siaran radio sebagai alat bukti. Pada hari yang sama massa FPIS mendatangi kantor Radio PTPN dan berdemonstrasi menuntut agar Welson diadili. FPIS juga meminta pihak radio menyampaikan permintaan

⁷ Nama yang sebenarnya tidak lazim bagi seorang Kristen mengingat nama Ahmad biasanya hanya dipakai oleh Muslim.

maaf selama tujuh hari berturut-turut di lima surat kabar lokal Jawa Tengah dan mengudarkan permintaan maaf kepada umat Islam lima kali dalam sehari juga selama tujuh hari berturut-turut. Tidak ingin urusan bertambah panjang manajemen radio langsung menyetujui tuntutan para pengunjung rasa itu (*Solopos*, 3 Maret 2000).

Akibat penyitaan peralatan siarannya oleh polisi Radio PTPN tidak bisa mengudara selama dua hari yaitu pada hari Kamis 2 Maret-Jum'at 3 Maret. Terhentinya siaran Radio PTPN ini mendapat perhatian dari 6 lembaga pers. Mereka meminta polisi segera mengembalikan peralatan siaran Radio PTPN dan menyerukan kepada jurnalis agar bekerja secara independen, profesional, dan tidak memihak. Mereka juga mengharapkan agar wartawan di Solo tidak terpengaruh kasus Welson dan tetap meneruskan pekerjaannya sesuai tuntutan profesi (*Solopos*, 4 Maret 2000). Pada hari Sabtu 4 Maret 2000 Radio PTPN sempat mengudara sejenak dari pagi hingga sore namun siaran kembali dihentikan untuk tujuh hari berturut-turut menyusul adanya kesepakatan lanjutan antara manajemen radio dengan sejumlah elemen umat Islam (*Solopos*, 6 Maret 2000).

Kasus Welson rupanya mengundang kekhawatiran dapat memicu konflik bernuansa agama sehingga Departemen Agama Solo mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk membahas kasus ini. Pertemuan antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama dilangsungkan tanggal 8 Maret di Gedung Bhayangkara Polwil Surakarta. Dalam pertemuan ini selain kasus Welson dibahas pula soal beredarnya selebaran gelap yang "memojokkan agama tertentu". Terkait kasus Welson pihak kepolisian menegaskan akan menyelesaikannya secara hukum. Adapun mengenai beredarnya selebaran gelap polisi akan mengadakan operasi untuk

menyita selebaran gelap tersebut. Dari hasil pertemuan pemerintah dan tokoh-tokoh agama disepakati untuk selalu mengadakan pertemuan dan silaturahmi sehingga jika ada persoalan di antara umat beragama bisa segera diselesaikan. Dalam kesempatan yang sama Kapolwil Surakarta juga menghimbau agar apa yang terjadi atas Radio PTPN Rasitania menjadi bahan instropeksi bagi media massa agar kejadian serupa tidak terulang (*Solopos*, 9 Maret 2000).

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan akhirnya Welson diajukan ke pengadilan pada 24 Mei 2000. Sidang perdana Welson di PN Surakarta menyedot perhatian publik. Ratusan pengunjung menghadiri sidang ini. Welson yang didampingi 15 orang pengacara didakwa Jaksa Penuntut Umum telah "melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama Islam". Pokok dakwaan jaksa adalah pernyataan Welson dalam dialog interaktif di Radio PTPN Rasitania tanggal 24 Februari 2000 yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam adalah seorang Kristen. Atas perbuatannya itu Welson dijerat dakwaan primer Pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan dakwaan subsider Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dalam persidangan ini Welson mendapat cemoohan dari pengunjung. Aparat kepolisian yang menjaga jalannya persidangan harus bekerja keras mengamankan Welson dari ancaman kekerasan fisik (*Solopos*, 25 Mei 2000).

Sidang-sidang berikutnya berlangsung panas. Dalam sidang kedua massa pengunjung tidak hanya mencemooh Welson namun juga tim pengacaranya. Petugas kepolisian dari Polresta Solo terpaksa harus mengamankan tim pengacara di ruang majelis hakim usai sidang untuk menghindari amukan

massa. Polisi juga memberikan pengawalan ekstra ketat ketika mereka pulang. Pada sidang kedua ini tim pengacara Welson mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa yang intinya menyatakan bahwa dakwaan tersebut prematur karena tidak menyentuh konteks pernyataan Welson yang dianggap melecehkan Islam yaitu tentang pertanyaan apa yang diajukan kepadanya sehingga memunculkan pernyataan menghebohkan tersebut padahal pernyataan Welson adalah dalam rangka menjawab pertanyaan pendengar. Selain itu tim pengacara menggugat tidak adanya peringatan kepada Welson untuk menghentikan perbuatannya bilamana ia memang dianggap melakukan penodaan agama. Padahal sesuai ketentuan UU PNPS No. 1/1965 pelaku penodaan agama harus diberi peringatan terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Tim pengacara juga menggugat sikap pihak radio yang tidak memberikan kesempatan kepada Welson untuk mengklarifikasi pernyataannya sebagaimana diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers (*Solopos*, 30 Mei 2000). Ekspesi tim pengacara ini ditolak majelis hakim (*Solopos*, 6 Juni 2000).

Menanggapi dakwaan yang dialamatkan kepadanya Welson membacakan pleidoi di hadapan majelis hakim. Dalam pembelaannya Welson meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya dalam dialog interaktif di Radio PTPN namun ia menegaskan bahwa permintaan maafnya itu tidak mengubah pandangannya tentang Nabi Muhammad SAW. Menurutnya pernyataan tersebut adalah pendapat yang didasarkan atas analisis historis dan oleh karenanya ia tidak akan mengubah pendapat tersebut kecuali ada bukti historis lebih kuat yang bisa membantahnya. Lebih lanjut Welson mengklaim bahwa pendapatnya itu didasarkan atas Al Qur'an, hadits, dan pendapat ulama Islam sendiri. Ia pun kembali menandakan bahwa dirinya tidak

bermaksud mendiskreditkan Islam. Mengenai pernyataannya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjadi seorang Kristen Welson menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kristen adalah ajaran Kristen yang murni yaitu "kekristenan tauhid". Untuk mendukung pembelaannya ini Welson mengutip beberapa ayat Al Qur'an dan sejarah Kristen. Tindakan Welson mengutip ayat Al Qur'an ini mengundang kemarahan pengunjung sidang (*Solopos*, 27 Juni 2000).

Usai melalui serangkaian persidangan akhirnya pada 3 Juli 2000 majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Welson sesuai tuntutan jaksa. Majelis hakim menilai tidak ada hal yang meringankan tuntutan kepada Welson karena ia tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya (*Solopos*, 4 Juli 2000). Menanggapi vonis yang dijatuhkan atasnya Welson memutuskan untuk mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi. Pengacara Welson menyatakan bahwa proses persidangan tidak berlangsung secara bebas dan adil. Banyak tekanan dari pengunjung yang memengaruhi hakim, jaksa, pengacara, maupun terdakwa (*Solopos*, 7 Juli 2000). Banding Welson sendiri ditolak sehingga ia harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun di LP Surakarta dan LP Kelas 1 Kedungpane Semarang (Welson, 2011).

Kasus Welson adalah contoh kuatnya sensitivitas masyarakat mengenai masalah agama. Sedemikian kuatnya sensitivitas ini sampai pernyataan kontroversial yang bagi sebagian orang tampaknya lebih merupakan misinformasi atau misinterpretasi ketimbang penghinaan pun bisa dianggap sebagai penodaan agama dan berujung di pengadilan. Sebagaimana dalam aksi solidaritas Maluku elemen-elemen umat Islam juga berperan besar dalam mengangkat kasus Welson yang kemudian membuatnya diseret ke meja hijau. Tindakan polisi yang bergerak cepat

menangkap Welson, tuntutan hukuman maksimal dari jaksa, dan vonis hakim yang mengabdikan sepenuhnya tuntutan jaksa menunjukkan para penegak hukum ini bersikap responsif terhadap desakan elemen-elemen Islam untuk menghukum Welson. Dengan kata lain tekanan elemen-elemen Islam tersebut efektif mendorong dijatuhkannya hukuman atas seseorang yang dianggap melecehkan Islam. Sejauh mana proses peradilan Welson berlangsung secara adil baginya dan sejauh mana hakim mengambil keputusan secara merdeka sesungguhnya masih bisa dipertanyakan. Meskipun demikian karena proses peradilan dan keputusan yang diambil dalam proses itu dimaksudkan sekadar untuk meredakan amarah sebagian masyarakat maka tidak heran jika soal keadilan bagi terdakwa dan kemerdekaan hakim menjadi urusan nomor dua.

Kesimpulan

Hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya antara umat Islam dan Kristen sering diklaim oleh pemerintah dan masyarakat berjalan harmonis. Walaupun begitu tidak berarti tidak ada ketegangan dan persaingan sama sekali antar kedua komunitas berbeda agama ini. Dalam kasus Surakarta, di balik hubungan yang harmonis di permukaan, persaingan dan kecurigaan berlangsung di bawah permukaan. Hanya saja persaingan ini tidak mencuat menjadi konflik terbuka, lebih-lebih lagi konflik fisik. Timbulnya persaingan kecurigaan, dan ketegangan di bawah permukaan itu sendiri berlangsung di tengah konteks intensnya proselitisasi agama, baik oleh pihak Muslim maupun Kristen, yang tentu saja membawa konsekuensi tumbuhnya identitas keberagamaan baik di kalangan Muslim maupun Kristen.

Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi munculnya kelompok-kelompok atau tindakan yang menonjolkan identitas primordial, termasuk agama. Konflik Maluku menjadi momentum bagi maraknya kemunculan kelompok-kelompok dan aksi di Surakarta yang mengusung identitas Islam dalam rangka solidaritas terhadap umat seiman. Namun hal serupa tampaknya tidak terjadi di kalangan Kristiani. Dinamika hubungan Muslim-Kristen di Surakarta pasca-berakhirnya Orde Baru diwarnai pula dengan kasus “penodaan agama” yang berakhir di pengadilan. Pihak-pihak pemegang otoritas negara bersikap responsif menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum. Apa yang penting dari kasus ini bukan pada soal apakah tindakan yang dianggap sebagai “penodaan agama” itu memang benar-benar sebuah “penodaan agama” atau bukan melainkan bagaimana kuatnya sensitivitas dari sebagian umat beragama yang menandakan pula menguatnya identitas keberagamaan di tengah masyarakat Surakarta. Kuatnya sensitivitas itulah yang membentuk persepsi tentang apa yang dianggap sebagai “penodaan agama”.

Bibliografi

Buku dan Artikel

- Anonim. 1969. *Sala dalam Angka*. Surakarta: Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.
- _____. 1970. *Sala dalam Angka*. Surakarta: Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.
- _____. 1974. *Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*. Surakarta: Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- _____. 1975. *Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*. Surakarta: Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- _____. 1975. *Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*. Surakarta: Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1978. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1979. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1984. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1985. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1986. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1987. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1989. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1991. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1993. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1994. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1995. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik Kotamadya Surakarta.
- _____. 1996. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: BPS Kotamadya Surakarta.
- _____. 1997. *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: BPS Kotamadya Surakarta.
- Ahmad Welson. 2011. *Solusi Mengatasi Konflik Islam-Kristen*. Semarang: Borobudur Publishing.
- Aragon, Lorraine V. 2001. "Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People", *Indonesia* 72: 45–79.
- Aritonang, Jan S. 2004. *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Brauchler, Birgit. 2003. "Cyberidentities at War: Religion, Identity, and the Internet in the Moluccan Conflict", *Indonesia* 75: 123-151.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eriyanto. 2003. *Media dan konflik Ambon: media, berita, dan kerusuhan komunal di Ambon 1999–2002*. Jakarta: Kantor Berita Radio 68 H.
- Fadli Zon. 2004. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: Institute for Policy Studies.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia. Small Town Wars*. New York: Routledge.
- Schwarz, Adam. 1997. *A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990's*. Saint Leonards: Allen & Unwin.

Soetono. 1953. *Kenang-Kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*. Surakarta: Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta.

Solahudin. 2011. *Dari NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

TGPF Kerusuhan Mei. 1998. *Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: tanpa penerbit.

TPFI DPW PK Jawa Timur. 1999. *Temuan TPFI (Tim Pencari Fakta Independen) DPW Partai keadilan Jawa Timur atas Kasus Banyuwangi*. Surabaya: tanpa penerbit.

van Bruinessen, Martin. 2013. *Contemporary Developments in Indonesian Islam. Explaining the Conservative Turn*. Singapura: ISEAS.

Majalah dan Surat Kabar

Adil tahun ke-43 (November 1974) no. 4; tahun ke-43 (Januari 1975) no. 8.

D & R no. 23 edisi 25 Januari 1997.

Media Dakwah no. 299 Muharram 1420/ Mei 1999.

Solopos 30 Januari 1999; 6 Februari 1999; 12 Maret 1999; 13 Maret 1999; 12 April 1999; 14 April 1999; 15 April 1999; 16 April 1999; 18 April 1999; 19 April 1999; 20 April 1999; 22 April 1999; 26 April 1999; 27 April 1999; 28 April 1999; 20 Januari 2000; 4 Maret 2000; 6 Maret 2000; 7 Maret 2000; 2 Maret 2000; 3 Maret 2000; 4 Maret 2000; 6 Maret 2000; 8 Maret 2000; 9 Maret 2000; 25 Mei 2000; 30 Mei 2000; 6 Juni 2000; 27 Juni 2000; 4 Juli 2000; 7 Juli 2000.